

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Program Keluarga Harapan Masih Perlu Ditingkatkan Efektivitasnya

Solo, Kamis (17 Oktober 2013) – Dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya wilayah Karesidenan Solo, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengadakan Diskusi Terbatas yang terkait dengan penyelenggaraan program keluarga harapan dengan tema "Efektivitas Program Keluarga Harapan". Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Novotel Solo pada hari ini (17/10) dengan narasumber **Anggota BPK, Agus Joko Pramono, Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Hatta, dan Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Moh. Abdul Kholiq Hasan**. Diskusi terbatas ini dihadiri oleh pemangku kepentingan BPK yang terdiri dari para kepala daerah, sekretaris daerah, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas sosial, kepala kantor statistik daerah, pendidik/akademisi, dan tokoh masyarakat se-wilayah Karesidenan Solo, serta para pejabat di lingkungan BPK.

Kegiatan diskusi ini bertujuan (1) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program keluarga harapan; (2) Memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan program keluarga harapan yang lebih efektif; dan (3) Meningkatkan sinergi efektif antara BPK dan DPR serta para pelaksana program keluarga harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan, sebagai imbalannya RTSM/KSM tersebut diwajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke Puskesmas dan/atau menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan.

PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). BPK telah melakukan pemeriksaan atas PKH selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait PKH ini.

BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Prioritas pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam kebijakan pemeriksaan adalah sejalan dengan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Salah satu prioritas pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan atas program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.

Dalam paparannya, Agus Joko Pramono menjelaskan mengenai permasalahan yang ditemukan BPK dalam pelaksanaan PKH pada Tahun 2012 antara lain: 1) komitmen pemerintah daerah dalam mendukung PKH masih kurang; 2) proses validasi tidak sesuai ketentuan sehingga hasil validasi tidak akurat; 3) proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal; 4) tidak ada keseragaman kebijakan yang ditetapkan oleh Kemensos (dhi. UPPKH pusat) sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif; dan 5) monitoring rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum.

Muhammad Hatta dalam paparannya menjelaskan bahwa jumlah wilayah pelaksanaan PKH setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, PKH dilaksanakan pada 166 wilayah kabupaten/kota dan 1.909 kecamatan, sedangkan pada tahun 2013 PKH dilaksanakan pada 497 wilayah kabupaten/kota dan 2.667 kecamatan. Untuk Provinsi Jawa Tengah, PKH dilaksanakan di wilayah Pati, Kudus, Sukoharjo, Klaten, Batang, Pekalongan, Banyumas, Kota Semarang, Kota Salatiga dan pengembangan kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Cilacap, Rembang dan Wonogiri. Alokasi anggaran PKH Tahun 2012 sebesar Rp1,8 triliun dengan sasaran 1,516.000 KSM. Sedangkan pada tahun 2013 alokasi anggaran sebesar Rp2,8 triliun dengan sasaran 2,4 juta KSM. Secara konseptual, PKH lebih baik daripada bantuan langsung tunai (BLT) namun program PKH masih terdapat kelemahan yang perlu dicermati antara lain: 1) prosedur PKH jauh lebih rumit daripada BLT; 2) kalangan akademisi, pegiat LSM, dan analis di Indonesia cenderung melihat bahwa kemiskinan hanya bisa dikurangi melalui pemberian modal usaha, kredit mikro, pelatihan wirausaha, dan program pemberdayaan ekonomi dalam arti sempit; 3) PKH tidak diberikan pada semua keluarga miskin melainkan hanya kepada RTSM yang memiliki ibu hamil atau anak usia sekolah dan memiliki identitas yang jelas.

Dalam paparannya, Moh. Abdul Kholiq Hasan menyampaikan bahwa kesejahteraan secara materi telah terbukti tidak cukup untuk menjadikan manusi bertaqwa dan berkarakter mulia, oleh karena itu selain ekonomi keluarga juga memerlukan pendidikan agama yang cukup agar tercipta keluarga harapan yang berkarakter anti korupsi.

Melalui kegiatan ini, BPK berharap mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap peran BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat meningkat.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Informasi lebih lanjut:

Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media.

Telp. 021 25549000 Ext. 1200 Fax. 021 57854097

Email : hubunganmedia@bpk.go.id